

**HASIL KEPUTUSAN  
FORUM KONSULTASI PENGUATAN PERAN KOPERASI SEBAGAI LEMBAGA  
KEUANGAN FORMAL BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL  
Batam, 25-27 Juli 2018**

Setelah mendengar dan memperhatikan arahan dari Deputi Bidang Pembiayaan, Walikota Batam, Anggota Komisi VI DPR-RI (Drs. H. Nyat Kadir), serta hasil pembahasan dengan para Narasumber, dengan ini diperoleh hasil Forum Konsultasi Penguatan Peran Koperasi sebagai Lembaga Pembiayaan Formal, sebagai berikut :

1. Peran KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi sangat strategis sebagai solusi untuk peningkatan akses Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap permodalan, mengingat jumlahnya secara nasional mencapai sebesar 79.543 Unit yang tersebar di pelosok tanah air.
2. Kondisi geografis Indonesia yang merupakan kepulauan berdampak pada terkendalanya fungsi intermediasi lembaga keuangan menjadi kurang optimal. Sejumlah kendalanya antara lain infrastruktur lembaga keuangan belum berpihak secara maksimal pada pelaku UMK.
3. Perwakilan Anggota Komisi VI DPR-RI menyatakan dukungan atas langkah – langkah strategis Kementerian Koperasi dan UKM dalam upaya memberdayakan UMK melalui koperasi, khususnya peningkatan akses pembiayaan, serta penumbuhan wirausaha pemula yang tentunya memberikan kontribusi pada penurunan angka pengangguran, penyerapan tenaga kerja, dan akhirnya berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan.
4. Perlu dibangun kesepahaman yang sama dan komitmen yang sama antara legislatif, eksekutif dan stakeholder terkait terhadap tercapainya tujuan penguatan koperasi sebagai lembaga keuangan formal bagi UMK. Dalam penyusunan program pemberdayaan koperasi tidak menggunakan lagi rujukan koperasi sebagai lembaga keuangan alternatif yang berkonotasi hanya sebagai pelengkap saja, dan tidak menjadi objek prioritas dalam industri keuangan disektor UMK.
5. Mengingat posisi strategis KSP/KSPPS dalam Pembiayaan UMK, PIP Kementerian Keuangan mendorong agar lebih banyak KSP/KSPPS sebagai penyalur Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Terkait dengan hal tersebut dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :
  - a. Melakukan evaluasi dan kajian, terkait :
    - 1) Suku bunga yang layak bagi Koperasi, sehingga Pembiayaan UMi dapat memberikan nilai tambah baik bagi koperasi maupun anggotanya.

- 2) Persyaratan Pembiayaan UMi yang lebih berkeadilan dan kepedulian bagi koperasi, dengan tetap mempertimbangkan risiko yang dapat diminimalisasi.
  - b. Melakukan sosialisasi Pembiayaan UMi secara regional dan jemput bola terhadap usulan koperasi sebagai penyalur Pembiayaan UMi yang telah diseleksi Kementerian Koperasi dan UKM.
6. Pemerintah Daerah perlu memetakan posisi dan kondisi koperasi pada wilayah binaannya, khususnya untuk KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi dalam klasifikasi penilaian kesehatan koperasi. Dengan demikian, pola pembinaan, penguatan dan pengembangannya dapat dilakukan dengan tepat tujuan dan sasaran, serta lebih optimal. Untuk itu, diharapkan Dinas Koperasi dan UKM di Provinsi dan Kab/Kota perlu membangun dan memaksimalkan pengelolaan data base penilaian kesehatan koperasi yang didukung system IT secara bertahap sesuai kebutuhan.
  7. Dalam rangka mendorong dan menumbuhkan koperasi berkualitas, khususnya KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi sebagai lembaga pembiayaan formal, perlu dilakukan penguatan KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi melalui sertifikasi kompetensi pengelola.
  8. Kemenkop dan UKM bersama Dinas KUKM Provinsi dan Kab/Kota mendorong KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi sebagai penyalur KUR dan Pembiayaan UMi. Untuk itu, perlu dipersiapkan secara selektif, minimal 1 (satu) provinsi/DI sebanyak masing – masing 1 (satu) koperasi yang potensial.
  9. LPDB Merupakan salah satu sumber pembiayaan yang representatif bagi Koperasi dan UKM. Namun demikian saat ini LPDB-KUMKM tengah melakukan reviu dan penyempurnaan terhadap peraturan perundangan sebagai regulasi pengelolaannya sehingga penyalurannya belum optimal. Diharapkan LPDB KUMKM dapat segera menyelesaikan peraturan terkait penyaluran sehingga dana bergulir LPDB-KUMKM dapat segera dimanfaatkan kembali oleh Koperasi dan UKM.
  10. Dalam rangka optimalisasi penyaluran Pembiayaan UMi melalui koperasi PT. BAV membuka diri untuk konsultasi dan bimbingan kepada koperasi yang berminat sebagai penyalur Pembiayaan UMi. Diharapkan koperasi yang berminat segera mengkomunikasikannya sehingga dapat terjadwal dengan baik.
  11. Penilaian kesehatan merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan terhadap KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi. Untuk itu Deputi Bidang Pengawasan telah mempersiapkan rencana aksi, antara lain:

- a. Menumbuhkan Tenaga Penilai Kesehatan Koperasi secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan penilaian kesehatan koperasi di Provinsi/DI dan Kabupaten/Kota.
  - b. Menyusun rancangan database profil dan klasifikasi KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi.
  - c. Menyusun rancangan aplikasi pelaporan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi secara online.
  - d. Membangun satgas pengawasan koperasi di Provinsi/DI dan Kabupaten/Kota.
12. Dalam rangka menumbuhkan dan memperkuat peran KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi perlu komitmen dan dukungan program dan anggaran baik melalui APBN dan APBD khususnya untuk kegiatan, yaitu :
- a. Penguatan Manajemen Melalui Kegiatan pelatihan pengelola KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi.
  - b. Penerapan sisten IT dalam layanan Simpan Pinjam.
  - c. Peningkatan peran KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi sebagai lembaga keuangan formal melalui Forum Koordinasi dan konsultasi dalam rangka pemantapan sinergi dengan lembaga terkait.
  - d. Peningkatan efektifitas penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi melalui kegiatan :
    - 1). Peningkatan kapasitas penilai kesehatan.
    - 2). Penilaian kesehatan sesuai kewenangan (UU NO. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah).
13. Forum konsultasi pembiayaan antara Koperasi dan UKM bersama Dinas KUKM Provinsi/DI diharapkan dapat menjadi agenda rutinitas tahunan dalam penyusunan program dan anggaran Deputy Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM RI.
14. Hasil keputusan ini agar dilaporkan kepada Pimpinan Daerah masing – masing, dan diharapkan dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan anggaran TA 2019.

Batam, 27 Juli 2018  
Ketua Penyelenggara

(Drs. Sutarjo, MM)